BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah mengandung konsekuensi, dimana penyelenggaraan pemerintah mengalami perubahan signifikan baik di pusat maupun di Kabupaten dan Kota. Sebagai salah satu dampak dari gerakan reformasi yang mengamanatkan dan menuntut adanya kebijakan pelayanan kepada publik/masyarakat yang dapat memberikan hasil yang lebih konkrit dan merata, dengan setiap tahapan proses pelaksanaanya dapat dipertanggung jawabkan (*acuntabel*) baik secara kinerja finansial, maupun manajerial.

Otonomi yang diberikan ke pemerintah daerah mengandung arti bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Tugas dan kewajiban tersebut menyangkut penyelenggaraan dan pengembangan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, pengembangan lingkungan yang demokratis, adil dan merata, serta menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah.

Merencanakan dan mengatur keluarga adalah soal kemanusiaan yang sekarang ini sedang diusahakan pelaksanaannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Pembangunan itu adalah pembangunan manusia, maka kelahiran manusia itupun harus diatur. Mengacu pada pembangunan manusia, untuk itu

tingkat kelahiran harus diatur dengan baik agar tidak terjadi lonjakan penduduk yang menjadikan hambatan bagi pembangunan nasional ataupun daerah. Pengaturan harus diadakan, agar kenaikan jumlah penduduk tidak semakin meningkat dan jumlah angka kelahiran anak semakin berkurang. Kelahiran anak tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk, khususnya yang tidak disertai dengan pertumbuhan yang cukup dalam produksi nasional dapat juga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitaan dengan kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya penyediaan makanan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas.

Permasalahan dalam pembangunan Keluarga Berencana adalah penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, merupakan bagian penting yang harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan dalam perencanaan selanjutnya. Permasalahan yang terjadi pada pembangunan Keluarga Berencana yang harus diperhatikan adalah masih tingginya angka pertumbuhan penduduk.

tingginya angka pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kehidupan dan akan muncul berbagai masalah dalam masyarakat yang lainnya.

Berdasarkan Rakernas Program Keluarga Berencana (KB) tahun 2011, yang mengamanatkan perlunya ditingkatkan peran pria/laki-laki dalam program KB, ditindak lanjuti melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/HK-010/B5/2001 tanggal 17 Januari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan membentuk Direktorat Partisipasi Pria di Bawah Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang bertugas merumuskan kebijakan operasional Peningkatan Partisipasi pria, diputuskan perlunya intervensi khusus melalui program peningkatan partisipasi pria yang tujuan akhirnya terwujudnya keluarga berkualitas melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan, promosi KB dan kesehatan reproduksi yang berwawasan gender.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pada pasal 43 Kepres 103 Tahun 2001 tersebut ditetapkan bahwa BKKBN mempunyai peran sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kelembagaannya selanjutnya disempurnakan melalui Kepres Nomor 109 tahun 1993 tentang Pembentukan Kementerian Kependudukan dan BKKBN.

Program KB tentang kedudukan dan fungsi BKKBN Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Kepres Nomor 9 Tahun 2004 pasal 114 ayat (2) bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Kabupaten/Kota diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi, tetap dilaksanakan oleh pemerintah sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan di lapangan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN melalui Keputusan nomor: 70/HK- 010/B5/2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Seksi khusus Peningkatan Patisipasi Pria di bawah Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang bertugas menyusun paket informasi sesuai kondisi sosial, menyiapkan, dan mengembangkan segmentasi sasaran dalam rangka peningkatan partisipasi KB pria yang pelaksanaanya secara tekhnis di kecamatan dan desa.

Kendala utama yang dihadapi oleh setiap daerah pada umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Permasalahan yang dihadapi mulai dari masih tingginya angka kematian bayi, dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan. Peningkatan jumlah kependudukan yang bisa timbul karena tidak adanya program KB diantaranya laju penduduk yang tinggi, dan jumlah penduduk pasti terus meningkat.

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,67 ha, yang terdiri atas 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3,215,548 jiwa, dengan sex ratio 103,91. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2010 di Kabupaten Bandung terdapat 104 penduduk laki-laki. (BPS Kabupaten Bandung, Survei Sosial ekonomi Daerah (suseda) Kabupaten Bandung Tahun 2010).

Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah ± 19 jiwa/hektar. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan *(dependency ratio)* mencapai 54,10 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 penduduk tidak produktif. (BPS Kabupaten Bandung, Survei Sosial ekonomi Daerah (suseda) Kabupaten Bandung Tahun 2010).

Meningkatnya jumlah masyarakat menjadikan suatu problematika dan sangat menggangu dari Pertumbuhan Ekonomi maupun Pembangunan nasional yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam menangani masalah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memberikan kewenangan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program KB.

BKBPP Kabupaten Bandung merupakan suatu badan atau instansi yang diberi kewenangan dalam Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana di Kabupaten Bandung. Sesuai dengan peraturan yang ada BKBPP diberi kewenangan oleh BKKBN dalam mengurus program KB yang berupaya untuk pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Bandung. BKBPP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis dan Daerah Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan penjelasan diatas peneliti tertarik dengan masalah yang ada di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah kepadatan penduduk mencapai 27 jiwa/ha sekitar 64.963 jiwa, dan bila dibandingkan dengan wilayah di Kecamatan yang lainnya seperti Kecamatan Arjasari tingkat kepadatannya 18 jiwa/ha sekitar 91.033 jiwa, Kecamatan Cimaung 9 jiwa/ha sekitar 73.010 jiwa, Kecamatan Pangalengan 5 jiwa/ha sekita 138.843 jiwa melihat yang telah diuraikan di atas Kecamatan Cangkuang masih lebih tinggi jumlah penduduknya dibandingkan dengan Kecamatan Arjasari, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pangalengan yang telah disebutkan di atas. (BPS Kabupaten Bandung, Survei Sosial ekonomi Daerah (suseda) Kabupaten Bandung Tahun 2011).

Masih rendahnya peran serta masarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dalam menjadi peserta KB yang aktif dikarenakan pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang pentingnya program KB. Masyarakat menilai “bahwa mempunyai banyak anak itu akan membawa rizki”.

Pemahaman tersebut merupakan salah satu faktor tidak terlaksananya program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat menjadi peserta KB aktif pada pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

Berdasarkan penjelasanan di atas terdapat juga masalah dari BKBPP tersebut pada pelaksana atau petugas yang ada di lapangan. Masih kurangnya SDM dan kemampuan dari setiap SDM yang ada di BKBPP Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang menyebabkan kurang efektifnya BKBPP Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Hal tersebut dilihat dari kurangnya petugas atau tenaga kerja di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang di lapangan hanya mempunyai 1 tenaga ahli. Idealnya jumlah petugas yang ada di lapangan seharusnya mempunyai 2 tenaga kerja, akan tetapi fakta pada lapangan hanya ada 1 tenaga ahli.

Kondisi demikian menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dan sebagai tolak ukur efektivitas tidaknya BKBPP Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul: **“Efektivitas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung (Suatu Studi pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana efisiensi BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kepuasan masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang pada Pelaksanaan Program KB pada BKBPP Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana Keunggulan BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana pengembangan BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas BKBPP di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung pada Pelaksanaan Program KB. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses dari BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui efisiensi dari BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang pada Pelaksanaan Program KB pada BKBPP Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui keunggulan dari BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui pengembangan BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat memahami dan menambah wawasan serta dapat memberikan manfaat tentang efektivitas BKBPP pada Pelaksanaan Program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
2. Kegunaan ilmiah, hasil penelitian ini dihapkan hasil dapat menjadi bahan informasi bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.
3. Bagi kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada BKBPP Kabupaten Bandung mengenai bagi pengembangan BKBPP pada Pelaksanaan Program KB.di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung